



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



KAPAL RO-RO BERLAYAR TANPA DANA APBD

BACA HALAMAN 2-4



**SETOR 5 NAMA USULAN
BAKAL CALON PJ GUBERNUR
KE KEMENDAGRI**

BACA HALAMAN 35



Kontraknya Rp 5 Miliar selama 3 Tahun, Kapal Ro-Ro Berlayar Lagi Tanpa Dana APBD

BONTANG - Direktur PT Bontang Transport, Abdul Malik, mengaku tidak menggunakan anggaran APBD Bontang untuk mengoperasikan kembali Kapal Ferry Bontang Ekspres II atau KM RoRo dengan rute Pelabuhan Ketapang Banyuwangi - Gilimanuk Bali.

Kapal RoRo yang sebelumnya kondisinya rusak parah dan tak laik berlayar, kini sudah bisa berlayar lagi sejak 16 Juli 2023. Dalam sehari, Kapal Roro mampu mengangkut penumpang kendaraan 15 kali trip dengan rute Ketapang-Gilimanuk.



"Sehari jalan dan sehari off. Tapi dalam sehari bisa 15 kali trip," tutur Abdul Malik, kepada Media Kaltim, Jumat (8/9).

BELAYAR LAGI TANPA APBD BONTANG



KAPAL RORO ITU

- **Nama Kapal:** KMP BONTANG EXPRESS II
- **Jenis Kapal:** Roro
- **Bendera:** Indonesia
- **Berat Kotor:** 2.257 Ton
- **Tenaga Mesin:** 2 x 1445 HP, Merk Caterpillar D 3512
- **Tahun Pembuatan:** 1993
- **Panjang Keseluruhan (LOA):** 51,00 meter
- **Panjang Antara Lunas (L.B.P.):** 49,13 meter
- **Tinggi Draft:** 6,00 meter
- **Lebar:** 18,00 meter
- **Kedalaman:** 3,00 meter

DATA: DIOLAH DARI BERITA MEDIA KALTIM.COM | FOTO: ISTIMEWA | GRAFIS: ANTO | EDITOR: AGUS SUKANTO

Menurutnya, untuk mengoperasikan kembali Kapal Ro-Ro, sejak dirinya dilantik Desember 2022, direksi PT Bontang Transport berusaha mencari pengelola yang tepat untuk mengoperasikan Kapal RoRo.

"Ini menjadi tantangan saya sejak dilantik. Saya beruntung didampingi direksi dan komisaris yang sangat paham dengan teknis kapal," tuturnya.

Akhirnya, terpilih Eastern Pacific Shipping (EPS), perusahaan asal Jakarta. Sistem kerjasama yang dibangun dengan kontrak sewa selama 3 tahun dengan nilai Rp 5.040.000.000. Pembayaran dilakukan setiap tahun.

"Jadi setiap tahun nanti kita akan menerima Rp 1 miliar lebih. Dan secara operasional mereka semua yang menjalankan. Termasuk gaji standar

UMK Banyuwangi, 24 karyawan kita di Kapal RoRo," tuturnya.

PERBAIKAN RP 4 MILIAR DITANGGUNG PENGELOLA

Sebelum berlayar, jajaran Direksi telah menganalisa kerusakan Kapal RoRo. Termasuk melibatkan lembaga audit independen Bureau Veritas (BV) dari Perancis.

"Kami harus ambil keputusan berani. Karena hasil kunjungan kami, kapal ini bisa tenggelam bila tidak segera dilakukan perbaikan total. Nah benar saja, dari hasil rekomendasi BV, saat docking di galangan kapal Surabaya, baru terlihat, kondisi di bawah mesin sudah ada lubang dan hanya ditutupi kran. Bisa dibayangkan, bila ini tidak segera ditambal," ungkapnya.

FOKUS BISNIS PELAYARAN

Abdul Malik mengatakan, dalam menjalankan usaha PT Bontang Transport, dirinya meminta perusahaan fokus dengan usaha pelayaran. Tidak lagi terpecah dengan usaha lain, seperti pertamanan, bengkel, dan agen travel.

"Maka itu, begitu saya masuk, saya lihat dalam akte notaris, cukup banyak usaha yang dijalankan. Ada pelayaran, pertamanan, bengkel, dan agen travel. Saya minta core business hanya di pelayaran. Jadi sudah saya keluarkan dalam akte untuk jenis usaha lainnya," bebarnya.

Sementara aset-aset yang berkaitan dengan usaha di luar pelayaran, saat ini disimpan di gudang Loktuan. "Ada beberapa aset spare part mobil di gudang Loktuan. Saya tidak berani otak-atik," tuturnya.

DOKUMEN KEDALUWARSA

Ada dua hal yang menjadi fokus Direktur PT Bontang Transport Abdul Hakim sebelum menjalankan kembali usaha pelayaran.

Yakni merekondisi kapal agar layak jalan dan memperbaiki seluruh dokumen kapal RoRo. Sebab, dokumen perizinan sudah kedaluwarsa. Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) terakhir 2016. Bahkan, tak memiliki dokumen keselamatan.

Padahal, kontrak kerja sama tengah berjalan dengan pihak penyewa sampai tahun 2022. "Jadi penyewa sebelumnya itu meminjam dokumen perusahaan lain untuk beroperasi," ujarnya.



Dirinya pun bolak-balik ke Kementerian Perhubungan Darat untuk mengurus seluruh dokumen kapal. "Aturan dari Kementerian Perhubungan Darat, untuk yang mengurus dokumen, bukan atas penyewa, tapi yang punya kapal. Saya pun harus bikin surat pernyataan di atas materai di Kementerian, agar tak lagi mengulang kesalahan masa lalu," bebernya. "Jadi semua sekarang ini seperti membangun usaha dari awal lagi," sambungnya.

BERSIAP BELI KAPAL LAGI TANPA APBD

Direktur PT Bontang Transport Abdul Hakim optimistis bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul beroperasinya Kapal RoRo.

Hanya, dirinya belum berani mematok berapa PAD yang akan disumbang dari Bontang Transport. "Saya belum berani bicara angka. Karena ini seperti memulai bisnis baru tanpa ditunjang lagi APBD," tuturnya.

Namun dari kerjasama dengan PT Eastern Pasific Shipping (EPS), sudah ada gambaran pendapatan yang akan diperoleh dari operasional Kapal RoRo. Namun ini belum operasional lainnya.

"Karena ketika kami dilantik, Pak Wali sudah menyampaikan, bahwa Direksi diminta mencari gaji sendiri. Prinsipnya kami akan berusaha dari usaha pelayaran yang kami jalankan ini," tuturnya.

Apakah tidak terpikir untuk membeli kapal lagi? Ia mengakui ada keinginan membeli kapal, namun dirinya masih akan mengevaluasi dalam satu atau dua tahun ke depan.

"Kita lihat dalam satu atau dua tahun ini. Yang jelas, walaupun membeli kapal, tidak menggunakan APBD. Kami hanya minta support dari pemerintah dari sisi kebijakan dan lainnya," sebutnya.

Rute yang saat ini potensial adalah jalur Ketapang Banyuwangi-Lembar Lombok. "Kalau jalur Ketapang-Gilimanuk sudah ditutup. Rute-rute yang potensial ini juga hasil diskusi kami dengan Kementerian Perhubungan Darat," pungkasnya. (MK)





MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure_samarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Nina Dewi

Guru PPPK Dituntut Harus Inovatif dan Kreatif

SAMARINDA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nina Dewi menyampaikan bahwa pada guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja mengikuti Orientasi PPPK pada Rabu (6/9/2023) lalu, harus menjadi guru yang inovatif dan kreatif.

Menurutnya, tantangan ke depan sangat berat. Sehingga suatu keharusan bagi guru untuk terus meng-upgrade kemampuannya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Semakin ke depan arah pemikiran peserta didik semakin maju dan kritis.

"Jadi guru wajib terus meng-up-

grade diri agar tidak tertinggal, dan mampu menjawab tantangan ke depan," imbaunya.

Dia juga menekankan, cara mengajar guru wajib lebih inovatif dan kreatif. Guru harus bekerja seoptimal mungkin karena tugas guru berat dalam menentukan kualitas mutu pendidikan peserta didiknya.

"Menjadi PPPK yang baik harus memiliki sikap disiplin dan bekerja ikhlas, apalagi guru memiliki tanggung jawab mengangkat derajat peserta didik supaya berhasil," ujarnya.

Lebih lanjut Nina Dewi berpesan agar para guru untuk terus berkembang dan tidak cepat puas diri di dalam zona nyaman. Terlebih, di

era yang semakin cepat berevolusi dan canggih ini akan menentukan kualitas mutu pendidikan peserta didiknya.

"Sekali lagi, kita patut bersyukur karena dari tenaga honorer telah menjadi Pegawai Pemerintah dengan sebutan PPPK. Bekerja dengan sepenuh hati dan penuh semangat, jaga niat dari dalam diri bahwa sebagai bagian ASN harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," pintanya. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Pelatihan Strategi Pengelolaan Kelas dan Metodologi Ice Breaking bagi Para Widyaiswara

SAMARINDA - Sebanyak enam orang widyaiswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim diberikan penugasan oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, untuk mengikuti pelatihan Strategi Pengelolaan Kelas dan Metodologi Ice Breaking.

Pelatihan ini dilaksanakan di Indies Heritage Hotel, Yogyakarta, selama dua hari, yakni pada tanggal 5-6 September 2023.

Kegiatan pelatihan dipandu langsung oleh Eva Rosmalia, seorang Master Trainer dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif PT. Bintang Anugerah Surya Semesta (BASS), Jakarta.

Selain Eva sebagai pelatih utama, pelatihan ini juga dibantu oleh Vava dan Arum. Kehadiran tim pelatih yang solid dan penuh enerjik ini berhasil menciptakan suasana kelas yang lebih hidup.

Salah satu peserta, Jauhar Efendi, menyampaikan bahwa materi pelatihan sangat menarik karena sangat relevan dengan tugas sehari-hari para widyaiswara.

Ia juga menekankan bahwa materi pelatihan selama dua hari mencakup berbagai aspek, seperti Strategi Pengelolaan Kelas, Roleplay, Menarik Atensi Peserta, Tantangan di dalam Kelas, Metodologi Ice Breaking, dan General Function Ice Breaking.

Pada akhir pelatihan, para peserta

satu per satu maju untuk menerima sertifikat. Enam orang peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan ini adalah Muchlis Syahrani, Andi M. Arpan, M. Deny Syahrani, Ady Akhmad Gazali, Imbran, dan Jauhar Efendi.

"Pelatihan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan performa para widyaiswara," kata Muchlis Syahrani, Widyaiswara Ahli Utama yang memiliki pengalaman paling senior,

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, kepada seluruh rekan-rekannya widyaiswara yang telah berpartisipasi dalam pelatihan ini. (mje/adv)



Kepala BPSDM Prov. Kaltim Dra. Nina Dewi (atas) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Kab. Kubar Nanzy Paskadalius, SE, M.Si (bawah).

Diikuti 160 Guru, BPSDM Kaltim Tutup Orientasi PPPK

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menutup rangkaian Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Rabu (6/9/2023) lalu, di Aula Utama BPSDM Prov. Kaltim, Jalan HM Rifadin Kelurahan Harapan Baru, Samarinda.

Acara penutupan dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Nina Dewi. Nampak pula acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang PKMF, Widyaiswara, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, jajaran BKPSDM Kabupaten Kutai Barat dan para undangan lainnya.

Kepala Bidang Pengembangan

Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Kubar Nanzy Paskadalius menyampaikan Orientasi PPPK ini diikuti 160 guru yang baru saja diangkat sebagai PPPK di lingkungan Pemprov Kaltim Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

"Jadi peserta PPPK Gelombang I itu ada 160 guru terbagi dari angkatan 56, 57, 58 dan 59. Jadi masing-masing jumlah peserta di setiap angkatan itu 40 Guru," paparnya.

Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Nina Dewi menyampaikan ucapan selamat kepada para peserta atas keberhasilan dalam menyelesaikan pelatihan dan terima kasih kepada semua pi-

hak penyelenggara atas kerja keras dan kerjasamanya sehingga pelatihan dapat terlaksana dengan baik.

Nina Dewi juga menekankan, guru harus mengajar lebih inovatif dan kreatif, guru harus bekerja seoptimal mungkin karena tugas guru berat khususnya menentukan kualitas mutu pendidikan peserta didiknya.

"Menjadi PPPK yang baik harus memiliki sikap disiplin dan bekerja ikhlas, apalagi guru memiliki tanggung jawab mengangkat derajat peserta didik supaya berhasil," tutupnya. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kaltim, Dr Ivan Hariyadi.

Dinkes Kaltim Imbau Orang Tua Imunisasikan Anak

SAMARINDA - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) mengajak seluruh orang tua agar lebih memperhatikan serta menjaga kesehatan anak mereka. Salah satu cara agar kesehatan anak dapat terjaga yakni dengan melakukan imunisasi.

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kaltim, Dr Ivan Hariyadi mengatakan imunisasi dapat dilakukan semasa anak masih bayi hingga sudah Sekolah Dasar (SD).

Hal ini dinilai sangat penting, sebab jika anak tak mendapat imunisasi maka daya tahan tubuhnya

akan lemah. Sehingga akibatnya anak akan lebih mudah sakit.

"Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan imunisasi ini untuk menjaga kesehatan anak-anak mereka," ucap Dr Ivan saat dikonfirmasi Kamis (7/9/2023).

Kata Dr Ivan, saat ini masih saja ada orang tua yang belum melakukan imunisasi terhadap anak mereka dengan berbagai alasan. Padahal, imunisasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah anak-anak menderita penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin.

"Ini merupakan program pemerin-

tah yang bertujuan untuk mencegah anak-anak menderita penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Saat ini tingkat cakupan imunisasi di Kaltim sudah cukup bagus. Kami juga telah memperkenalkan imunisasi-imunisasi baru seperti rotavirus, PCV dan HPV," ungkapnya.

Diharapkan para orang tua dapat melakukan Imunisasi kepada anak mereka, karena imunisasi merupakan langkah pencegahan yang paling efektif. "Imunisasi ini merupakan program pemerintah, sayang kalau tidak dimanfaatkan masyarakat," pungkasnya. (adv/vic)



Dr Jaya Mualimin saat memimpin rapat Rancangan Pergub Penanggulangan TBC.

Tekan Angka Penderita TBC, Dinkes Kaltim Gelar Rapat Bahas Rancangan Pergub

SAMARINDA-Guna menanggulangi penyakit Tuberkulosis (TBC), Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) menggelar rapat membahas rancangan peraturan Gubernur (Pergub) terkait penanggulangan TBC. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (7/9/2023).

Rapat ini digelar sebab TBC masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kaltim.

Kepala Dinkes Kaltim, Dr Jaya Mualimin mengatakan bahwa berdasarkan laporan Global TB tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam hal jumlah kasus TBC tertinggi, setelah India. Pemerintah telah menegaskan komitmennya terhadap eliminasi TBC melalui "Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC tahun 2030" dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 mengenai Penanggulangan Tuberkulosis.

Kata Dr Jaya, Rancangan Pergub

yang saat ini tengah disusun pihaknya ini bertujuan untuk mempercepat eliminasi Tuberkulosis di Kaltim sesuai dengan target nasional yakni pada tahun 2030.

"Kita harapkan dengan disusunnya pergub penanggulangan tuberkulosis ini agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga kasus Tuberkulosis bisa ditangani dan teratasi bahkan lebih cepat dari target nasional yaitu pada tahun 2030," ucap dr Jaya saat diwawancara usai rapat.

Ia menyebutkan, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5.010 kasus TBC di Kaltim. Akan tetapi, data per Oktober 2022 menunjukkan bahwa kasus TBC di Kaltim masih rendah, yaitu hanya mencapai 74% dari tahun sebelumnya.

Upaya mempercepat eliminasi Tuberkulosis di Kaltim pada tahun 2030 merujuk pada beberapa indikator diantaranya penurunan angka kejadian (incident rate) TBS menjadi 65/100.000 penduduk dan

penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6/100.000 penduduk.

"Pada tahun 2022, tercatat 42 kasus TBC RO, yang kemudian meningkat menjadi 62 kasus. Tingkat keberhasilan pengobatan TBC pada tahun 2022 masih rendah, yaitu sebesar 44 persen," ungkapnya.

Untuk menekan angka penderita TBC di Kaltim, Directly Observed Treatment Strategy (DOTS) menjadi strategi dalam penanggulangan Tuberkulosis yang terdiri dari 5 strategi. Yaitu komitmen dalam mendukung pengobatan TBC sampai tuntas, pendiagnosaan TBC melalui pemeriksaan bakteriologis, pendampingan Pengawas Menelan Obat (PMO) untuk menjamin kesembuhan, dan penyediaan obat TBC yang terjamin baik kualitas maupun kuantitas, serta pencatatan dan pelaporan kasus TBC yang baik.

"Dengan rancangan Pergub ini diharapkan dapat menekan angka penderita TBC di Kaltim," pungkaskannya. (adv/vic)



Salah seorang nominator mempersentasikan resensinya.

6 Nominator Lolos Lomba Resensi Buku Tingkat Provinsi Kaltim

SAMARINDA – Sebanyak 6 orang dari 65 peserta Lomba Resensi Buku Tingkat Provinsi Kaltim berhasil masuk nominasi. Lomba ini diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK/MA negeri dan swasta se-Kaltim.

Keenam peserta tersebut bakal diuji kembali yang dilakukan di ruangan Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim) oleh dewan juri yang berkompeten di bidangnya.

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM) DPKD Kaltim, Taufik menjelaskan bahwa 6 nominator yang sudah lolos tersebut, menulis resensi dari buku yang telah ditentukan oleh panitia yakni buku "Visi 2030 Kaltim Hijau Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan" yang salah satu penulisnya adalah mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Buku tersebut berupa buku elektronik atau e-book yang wajib diambil

oleh peserta melalui Aplikasi iKaltim, yakni aplikasi yang dikembangkan oleh DPKD Kaltim.

Lomba yang dimulai pada pukul 08.00 Wita, tersebut berjalan tertutup. Setiap nominator dipanggil secara bergantian untuk mempersentasikan hasil resensinya di hadapan dewan juri yang berasal dari kalangan akademisi, dosen, editor buku dan penulis buku.

Ditemui di sela-sela lomba, Taufik, mengatakan Lomba Resensi Buku ini adalah upaya dari DPKD Kaltim dalam meningkatkan budaya baca di kalangan anak muda dan mendorong pelajar khususnya anak tingkat SMA agar memiliki sisi kritis terhadap tulisan karya-karya penulis nasional ataupun daerah.

"Karena dengan lomba resensi ini, mereka akan menganalisa kelebihan dan kekurangan buku, memberi komentar, memberi saran, yang mana baiknya menyikapi isu-isu dalam suatu buku. Melalui resensi

ini, kita mendorong atau sisi lainnya memancing sikap kritis anak-anak muda terhadap karya tulis seseorang khususnya penulis nasional maupun lokal, jadi itu tujuan utamanya," ungkap Taufik.

Taufik berharap, peserta ini nanti bisa menjadi pionir dan motivator bagi yang lain jika ingin menjadi penulis resensi buku.

"Kita berharap mereka akan menjadi pionir atau motivator bagi rekan-rekannya yang lain di sekolah," harapnya.

Para dewan juri akan memberikan penilaian pada peserta dan pemenang diumumkan pada Jumat (8/9/2023) sore. "Pemenang akan diumumkan sore ini" ujarnya.

Pemenang 1,2 dan 3 serta pemenang harapan 1,2 dan 3 akan mendapatkan hadiah berupa Piala, Piagam dan uang pembinaan. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Kampung Tihi-tihi salahsatu kampung di wilayah pesisir Bontang.

Wujudkan Visi, Perlahan Wilayah Pesisir Bakal Diubah Jadi Objek Wisata

BONTANG – Seluruh wilayah pesisir Bontang memiliki potensi wisata, karenanya Pemkot Bontang harus mengelolanya dengan baik agar wujudkan visinya menjadikan Bontang sebagai kota wisata ke depannya. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (4/9/2023) lalu.

Menurutnya, wilayah pesisir Bontang tak hanya Malahing saja yang berpotensi wisata, namun kampung-kampung di atas air lainnya pun juga punya potensi yang sama. Tinggal bagaimana pemkot bisa melihat berbagai macam keunggulan di masing-masing kampung tersebut.

“Setiap kampung punya keunggulan produk yang memiliki ciri khas daerahnya masing-masing, itu harus dimaksimalkan. Sehingga kalau ada yang datang ke masing-masing kampung itu, akan mendapatkan kearifan lokalnya,” ujarnya kepada awak media.

Dikatakannya, pemkot sudah tepat dengan visinya menjadikan Bontang sebagai kota wisata. Saat ini perlahan visi tersebut mulai diwujudkan. Setelah berhasilnya Malahing juara III nasional ADWI tahun 2023 dari Kemenparekraf RI, sekarang pemkot melalui Dispopar berencana mengubah Pulau Gusung menjadi objek wisata.

Namun ditambahkannya, semua itu perlu proses. Tidak bisa ujug-ujug terwujud. Saat ini Pemkot Bontang masih dalam tahap perencanaan untuk mengubah wilayah pesisir menjadi objek wisata.

“Kemarin Dispopar sudah buat perencanaannya. Di anggaran murni tahun depan kita lihat berapa yang bakal diajukan. Tentu bertahap lah kita perbaiki saprasnya. Karena tidak mungkin semua APBD itu kita fokuskan hanya untuk ke pesisir. Kita juga perlu untuk kesejahteraan masyarakat yang lain,” pungkasnya. (al/adv)



Perkuat Pemahaman Tentang Kontrak Jual-Beli LNG, Badak LNG Gelar Workshop Gas-LNG Sales Contract

BONTANG – Badak LNG sukses melancarkan workshop bertajuk Gas-LNG Sales Contract dalam konteks East Kalimantan System yang bertempat di Hotel Courtyard Bali pada Kamis (31/8) lalu. Dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta para produser gas di Kalimantan Timur, acara ini menjadi wadah sharing knowledge untuk membahas berbagai hal terkait kontrak penjualan gas LNG.

Workshop ini menghadirkan Konsultan Hukum Independen Alan Frederick sebagai narasumber yang memberikan pemahaman kepada peserta terkait Gas-LNG Sales Contract yang tidak dapat berdiri sendiri. Sebab terdapat banyak sekali kontrak atau transaksi yang dapat menjadi faktor pendukung hingga akhirnya suatu sales contract dapat dibuat.

Selain itu, berbagai pembahasan yang berkaitan dengan Gas-LNG Sales Contract turut disampaikan

dalam workshop tersebut. Mulai dari aspek hukum, keuangan, komersial, dan lain sebagainya yang harus tertera di dalam LNG Sales Contract.

Aldy Amir selaku Kepala Kelompok Kerja Kajian Strategi Hulu Migas menyebutkan bahwa workshop ini sangat bermanfaat bagi para insan di dunia minyak dan gas, agar dapat memahami hal-hal yang perlu diper-

siapkan dalam LNG Sales Contract antara penjual dan pembeli.

“Workshop ini sangat bermanfaat dilakukan untuk memperkuat pemahaman bagi rekan-rekan gas producers di Kalimantan Timur dan Badak LNG. Dari kegiatan ini diharapkan dari masing-masing pihak penjual dan pembeli paham hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dalam kontrak jual beli gas atau LNG,” pungkasnya.





Sebelum mengikuti acara Workshop Gas-LNG Sales Contract, pada Rabu (30/8) lalu para peserta telah melaksanakan site visit ke Terminal LNG Benoa untuk melihat fasilitas di Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Karunia Dewata serta ke PT PLN Indonesia Power.

Koordinator Komersialisasi LNG dan LPG SKK Migas, Zuchrizan Zain mengungkapkan bahwa melalui kegiatan site visit ini diharapkan para peserta workshop dapat mengetahui alur proses distribusi LNG. Mulai dari transportasi, penerimaan, regasifikasi, hingga diproses kembali menjadi gas untuk digunakan oleh pembangkit listrik yang ada di Benoa.

"Hari ini kami melakukan site visit ke FSRU Karunia Dewata serta ke

PT PLN Indonesia Power. Kunjungan ini bertujuan agar rekan-rekan dari Badak LNG tidak hanya mengetahui di sisi hulunya saja, tetapi juga mengetahui kegiatan yang terjadi di sisi downstream atau hilirnya," tutur Zuchrizan.

Badak LNG merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina. Berpengalaman selama 48 tahun sebagai operator kilang LNG, Badak LNG juga telah melakukan berbagai layanan teknis dan pelatihan ke berbagai kilang LNG dunia. Layanan tersebut diantaranya Technical Services, yaitu layanan teknis kepada perusahaan LNG untuk seluruh operasi yang berkaitan dengan engineering.

Kedua, layanan pendampingan kepada perusahaan LNG untuk memastikan tahap pre-commissioning, commissioning, hingga start-up kilang berjalan dengan baik melalui program Commissioning & Start-Up Assistance (CSUA). Ketiga, Operations & Maintenance Services, yakni jasa untuk membantu perusahaan LNG dalam mengoperasikan kilang. Keempat, menyediakan pelatihan untuk menyiapkan dan mencetak tenaga ahli profesional di industri LNG. Terakhir, menawarkan jasa penelitian dan pengembangan kepada perusahaan LNG untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan teknologi pemrosesan gas alam melalui program Research & Development. (adv)



Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

 media_kaltim
  mediakaltimdotcom
  mediakaltim.com
  media kaltim



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From **Rp 15.000** nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Keju



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Stok beras di Bulog Berau sebanyak 300 ton hingga awal tahun depan.

Sejak April, Harga Beras di Berau Naik Tapi Stok Aman

TANJUNG REDEB - Harga beras di Kabupaten Berau naik sejak April lalu. Hingga sekarang masih stabil di harga yang sama. Namun, itu tidak memengaruhi stok beras yang ada, termasuk distribusinya selama ini.

Hal itu dipaparkan oleh Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan. Dijelaskannya, harga beras premium naik dari Rp 15.200 per kg menjadi Rp 16.000 per kg. Sementara, harga beras medium naik menjadi Rp 15.000 per kg dari sebelumnya Rp 13.300 per kg. Serta beras yang termurah dari Rp 12.000 per kg menjadi Rp 14.000 per kg. Dan sekarang turun lagi menjadi Rp 13.000 per kg.

Memang diakuinya, harga beras secara nasional mengalami kenaikan. Yang disebabkan oleh elnino. Namun, dampak elnino sendiri di Berau tidak menyebabkan harga beras naik. Apalagi konsumsi beras di kampung lebih banyak dari produk sendiri.

"Kami juga membantu pemasaran petani lokal dari hasil panen Mei lalu.

Dan Agustus ini juga ada beras dari Labanan yang baru panen," ungkapnya.

"Kadang petani juga update isu nasional, seperti kenaikan beras ini jadi mereka ada yang menahan stok beras untuk dikeluarkan. Padahal sebenarnya di Berau harga beras tetap stabil sejak April," imbuhnya.

Dibeberkannya stok beras di Berau sudah aman hingga awal tahun depan. Pihaknya dalam hal ini bekerja sama dengan Bulog Berau untuk menyimpan stok beras tersebut. Di mana idealnya stok beras harus mampu memenuhi kebutuhan hingga dua bulan ke depan.

Pihaknya juga terus berupaya menstabilkan harga beras. Salah satunya dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Alhamdulillah stok beras masih aman sampai awal tahun depan. Kalau sudah kurang dari dua bulan harus memikirkan untuk stoknya. Beras kalau disimpan terlalu lama

juga tidak bagus. Tapi beras ini cepat masuk dan keluar," pungkasnya.

Sementara, Kepala Bulog Berau, Muhammad Mukhlis menyampaikan, hingga Januari 2024 stok beras di gudang Bulog sekitar 300 ton. Serta akan datang 400 ton lagi.

Dirinya juga membeberkan bahwa harga beras di Berau memang umumnya lebih tinggi dari provinsi lain, baik untuk kelas medium maupun premium. Yang dibedakan berdasarkan mereknya.

"Kalau alasan kenaikan beras secara nasional memang disebabkan oleh elnino. Hingga menyebabkan supplier beras di luar negeri menghentikan ekspornya termasuk ke Indonesia," jelasnya.

"Beruntungnya, di Berau Insya Allah stok masih aman dan akan ada 400 ton lagi yang akan datang," tutupnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



Sebanyak 70 ekor kambing diberikan kepada kelompok tani di Kampung Samburakat dan Sembakungan.

Dua Kelompok Tani di Berau Terima Hibah 70 Ekor Kambing

TANJUNG REDEB - Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Berau memberikan bantuan hibah sebanyak 70 ekor kambing kepada kelompok tani di Kampung Samburakat dan Sembakungan Kecamatan Gunung Tabur.

Kabid Peternakan Distanak Berau, Eko Wahyu mengatakan, penyaluran hibah kambing tersebut telah dilakukan pada akhir Agustus lalu. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Serta memberdayakan potensi di masyarakat.

"Sebelumnya kambing telah dilakukan pengukuran, penandaan dan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu,"

jelasnya, Jumat (8/9/2023).

Lanjutnya, kambing-kambing tersebut juga telah dikarantina selama dua minggu. Kemudian baru disalurkan kepada masing-masing kelompok. "Ternak diistirahatkan di kandang penampungan dulu sementara selama 2 minggu," katanya.

Masing-masing kelompok menerima 35 ekor kambing yang terdiri dari 5 ekor jantan dan 30 ekor betina.

Adapun kandang kambing yang berada di Samburakat mampu menampung hingga 100 ekor kambing. Menurutnya kandang di sana cukup bersih. Rencana pemeliharaan ternak juga akan dijadikan dalam satu kandang.

"Kemudian tim melakukan pengecekan ulang pada ternak yang diterima setelah itu baru diserahkan kepada kelompok. Dengan disaksikan kepala kampung setempat," ungkapnya.

Setelah sampai di kandang, ternak tersebut juga langsung diberikan makan supaya kondisinya cepat pulih dan segar setelah menempuh perjalanan hingga kampung yang dituju.

Pihaknya juga memberikan sedikit arahan terkait pemeliharaan ternak yang baik dan benar kepada para peternak. **(mnz/dez)**

Pewartu: Amnil Izza
Editor: Dezwan

Belum Ada Opsi Penggusuran, Pemukiman Kumuh di Kelurahan Bugis Bakal Ditata

TANJUNG REDEB - Pemukiman kumuh di bantaran Sungai Kelay Kelurahan Bugis bakal dirapikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Agar terlihat lebih rapi apalagi, banyak dilewati wisatawan yang berangkat dari Dermaga Sanggam.

Wakil Bupati Berau Gamalis meninjau langsung pemukiman tersebut pada Jumat (8/9/2023) sore. Dengan menyusuri Sungai Kelay sepanjang 1 km yang terdiri dari 4 RT yang terdiri dari sekitar 1.000 Kartu Keluarga (KK). didampingi instansi terkait dan rombongan. Di mana sebelumnya mereka telah mengadakan rapat internal sebelum menyusuri sungai.

"Kami mencoba untuk menyamakan mata terkait dengan bantaran Sungai Kelay yang hari ini sudah kita susuri itu terlihat sangat memprihatinkan. Bahkan dari sisi estetika sudah lepas," terangnya, Jumat (8/9/2023).

Terlebih Kabupaten Berau dicanangkan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penataan tersebut tidak bisa dipisahkan dari keindahan tata kota. Tentunya harus ditangani secara baik dan rapi yang memiliki nilai estetika.

Saat ini baru direncanakan untuk penanganan jangka pendeknya. Yakni dengan merapikan pemukiman tersebut agar tidak terlihat kumuh.

"Mungkin saja nanti akan dicat warna warni. Mungkin nanti akan di cat warna warni, bisa dengan graffiti ataupun dengan keindahan yang lain. Kita sesuaikan dengan desain yang akan dibuat," katanya.

Pihaknya juga telah menyiapkan perencanaan jangka panjang. Lan-taran waktu yang tidak cukup hingga akhir tahun hanya bisa dilakukan penanganan jangka pendek.

Pun belum akan dilakukan peng-gusuran sebab hal itu harus diper-hitungkan matang-matang. Serta harus siap dengan dampak sosial ekonomi yang akan ditimbulkan. Se-lanjutnya, jelas akan dilakukan so-sialisasi kepada masyarakat setelah desain yang disusun selesai dan di-publikasikan.



Kondisi belakang rumah pemukiman kumuh di bantaran Sungai Kelay Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb.

"Kalau kita bicara jangka panjang waktu kita tidak akan cukup, dan kalau dilakukan penggusuran kita harus perhitungankan dengan baik dan harus memikirkan dampak so-sialnya," paparnya.

Gamalis menilai sisi bantaran Sun-gai Kelay sebelahnya yakni di Kelu-rahan Sambaliung sudah bagus. Jika ada yang perlu dibenahi bisa saja akan dilakukan pengecatan ulang titik per titik.

Terkait sumber dana rencananya akan diusahakan dengan bantuan pihak ketiga melalui dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pihaknya belum dapat memastikan apakah dapat menggunakan Ang-garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ditakutkan berbenturan dengan aturan yang berlaku.

"Tapi kalau tidak diperbolehkan, kita akan usahakan dengan bantu-an pihak ketiga. Saat ini kami fokus memikirkan penanganan jangka pendeknya," pungkasnya.

Sementara, Lurah Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, Mu-hammad Hidayat menyampaikan, pihaknya tentu menyambut terkait penanganan kawasan pemukiman di lingkungannya.

Pihaknya juga mengakui bahwa ru-mah-rumah warga di sana memang terlihat kumuh dan akan mengurangi

daya tarik wisata di Berau khususnya di Kelurahan Bugis.

"Karena wisatawan kita kalau ber-wisata ke pesisir pantai dan melalui Der-maga Sanggam pasti melewati pinggir sungai ini. Jangan sampai salah fokus ke kondisi rumah warga yang kumuh dan tidak terawat," ucapnya.

Dijelaskannya, pemukiman di ban-taran Sungai Kelay tersebut terban-gun sudah sejak tahun 1980an. Berkembang hingga tahun ini KK di sana mencapai sekitar 1.000 KK.

"Sebenarnya sejak 2019 lalu sudah ada perencanaan untuk penataan ka-wasan tapi dialihkan untuk pandemi Covid-19. Kalau dilaksanakan pasti sudah bagus dan tertata sekarang," tuturnya.

Hidayat berharap, rencana jangka panjang yang disampaikan Pemkab Berau bisa segera terealisasi tahun ini. Meskipun memang baru jangka pendek. Pihaknya sangat berharap pihak ketiga dapat membantu pen-ananganan tersebut.

"Kami juga ada dana RT yang diber-ikan Pemkab Berau Rp 50 juta per tahun. Tapi kami juga tidak berani menggunakan dana tersebut karena takut terbentur regulasi," terangnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



RAFI'I/MEDIA KALTIM

PLTU PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk, Balikpapan.

Transisi Energi, Upaya Kurangi Emisi “Jelajah Energi Kaltim” (4) Komitmen Turunkan Emisi, PLTU Teluk Balikpapan Manfaatkan 3 Persen Biomassa

BALIKPAPAN - Mengurangi emisi dengan melakukan transisi energi, secara konsisten coba dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk, Balikpapan. Di antaranya memanfaatkan energi biomassa, menjadi salah satu campuran batu bara sebagai bahan bakar Co-Firing.

Asisten Manajer Operasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk, Balikpapan, Dhidhik K Laksono, menjelaskan, PLTU yang memiliki kapasitas 2x110 Mega Watt (MW) ini menargetkan penggunaan Co-Firing dari energi biomassa sebanyak 3 persen. Setidaknya hingga akhir tahun 2023 ini. Dengan pemenuhan sementara dari dua supplier yang sudah berkontrak. Yakni 400 ton energi biomassa dari PT Teluk Borneo Nusantara (suplai dari TPAS Manggar) dan

850 ton energi biomassa dari PT AW Technology (suplai woodchip dari sekitar Balikpapan).

“Dengan kami melakukan survey dan terus berkomunikasi dengan supplier kita, target (3 persen) akhir tahun akan tercapai, optimis tercapai,” ujar Dhidhik pada mediakaltim.com.

Prosesnya sendiri, energi biomassa yang disuplai ke PT PLN Nusantara Teluk Balikpapan, akan dikumpulkan

dan dicampur dengan batu bara murni. Dengan perbandingan 3 persen energi biomassa dan 97 persen batu bara. Diaduk dan dicampur dan dikirim ke bunker untuk dibakar dalam boiler dan menjadi bahan bakar PLTU.

Meskipun ada komitmen 25 persen menggunakan energi biomassa. Tetapi Dhidhik belum berani berandai-andai ataupun memastikan tenggat waktu. Ia memilih untuk berkomitmen memenuhi 3 persen, selanjutnya baru menyusun target 25 persen.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Co-Firing PLTU Teluk Balikpapan menggunakan energi biomassa dimulai sejak 8 September 2022. Dengan durasi 4 jam, PLTU menggunakan total batu bara 280 ton dicampur Woodchip sebanyak 14,5 ton, berhasil menghasilkan beban sebesar 100 MW. Dilanjutkan uji coba pada 12 Desember 2022, menggunakan Woodchip, dengan status berhasil. Namun terkendala bahan baku Woodchip yang sulit didapat. “Keadaannya memang seperti ini, baru bisa memenuhi 3 persen,” lanjutnya.

Diketahui, PLTU yang berada di atas lahan 58,8 hektare ini menyuplai 35 persen pemenuhan listrik di Sistem Mahakam dan 17 persen di Sistem Interkoneksi Kalimantan. Dengan Daya Mampu Netto yang dihasilkan menca-

pai 1171,53 MW dengan Beban Kaltim 519,10 MW, masih surplus 652,43 MW.

Terpisah, Raditya Wiranegara, analis Senior IESR, menjelaskan penggunaan Co-Firing di PLTU Teluk Balikpapan dengan energi biomassa berupa Woodchip dan Bahan Bakar Jumpatan Padat (BBJP) yang merupakan limbah merupakan langkah mendukung transisi energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Di mana saat ini sudah mulai memanfaatkan 3 persen energi biomassa hingga akhir tahun ini.

Namun, tantangan utamanya, yakni keberlanjutan suplai energi biomassa menjadi tantangan utama. Perlu ada rencana jangka panjang yang harus dilakukan oleh PLTU Teluk Balikpapan. Sehingga suplai yang ditargetkan bisa terpenuhi.

“Baik itu dengan mengembangkan hutan tanaman energi maupun dengan pemanfaatan limbah lainnya, seperti limbah dari perkebunan sawit. Selain itu, rencana ini juga mesti menargetkan peningkatan rasio co-firing sehingga emisi yang dihasilkan dapat berkurang lebih banyak lagi, tentunya dalam rangka transisi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan,” tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

Transisi Energi, Upaya Kurangi Emisi “Jelajah Energi Kaltim” (5) Transisi Energi, Warga Desa Mulawarman Olah Kotoran Sapi Jadi Energi Biogas

KUKAR - Desa Mulawarman, yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang, tahu betul memanfaatkan potensi desanya. Terutama mengoptimalkan turunan dari sektor peternakan yang dimilikinya. Yakni memanfaatkan limbah berupa kotoran ternak menjadi potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) berupa energi biogas. Di samping sebagai energi baru pengganti untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hal ini dimulai sejak 2020 silam. Di mana biogas mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Berawal dari pembangunan infrastruktur pengolahan biogas yang disodorkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kalimantan Timur (Kaltim). Berupa pembangunan 6 unit infrastruktur pengolahan seperti bak penampungan kotoran sapi yang akan diolah, penampungan digester, dan bak pembuangannya.

Kemudian berlanjut pada tahun berikutnya pada 2021 sebanyak 14 unit infrastruktur serupa. Rupanya dianggap menjadi bantuan yang langsung dirasakan oleh 20 peternak, di desa terujung di Tenggarong Seberang ini. Setidaknya memangkas biaya kebutuhan gas untuk konsumsi rumah tangga.

“Desa kami khususnya yang menerima bantuan biogas sangat bermanfaat. Sejauh ini yang dapat baru 20 KK, termasuk pak kades sendiri,” ungkap Sekretaris Desa (Sekdes) Mulawarman, Bambang Irawan.

lapun mendorong pemanfaatan biogas dapat dirasakan seluruh warga Desa Mulawarman yang kini berjumlah sekitar 750 KK. Namun dengan syarat, setidaknya tiap KK memiliki kandang beserta ternaknya sendiri.

Bahkan angin segar seperti didapat oleh Desa Mulawarman. Dimana potensi biogas ini pun menarik perhatian salah legislator. Tentu ini membuka jalan dan potensi bagi Desa Mulawarman untuk kembali mendapatkan bantuan di tahun berikutnya.

Saat ini, di Desa Mulawarman total sudah ada 300 ekor sapi ternak dan



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Zainal Abidin saat menunjukkan meteran biogas yang berada dirumahnya.



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Zainal Abidin, salah satu warga yang menggunakan biogas untuk kebutuhan sehari-hari.

200 ekor kambing ternak yang sudah dimanfaatkan untuk mengolah kotorannya menjadi energi biogas. Bahkan salah satu kelompok ternak yang bernama Kelompok Sido Makmur akan mendapatkan bantuan kandang serta 260 ekor kambing di 2024. Setelah menjadi salah satu kelompok tertib administrasi.

Terpisah, Zainal Abidin, yang merupakan peternak di Desa Mulawarman pun sudah merasakan manfaat dari pengolahan biogas. Memanfaatkan kotoran sapi yang berasal dari ternak miliknya.

Pengolahan biogas pun disebutnya terbilang mudah. Dengan memasukkan kotoran sapi bercampur air ke dalam bak penampungan berukuran sekitar 1x1 meter. Kotoran yang dimasukkan dalam bak penam-

pungan tertutup, akan terfermentasi hingga menghasilkan biogas berupa gas metana. Gas metana inilah yang kemudian ditampung dalam bak digester, dan dialirkan ke rumah warga melalui sambungan pipa. “Kencingnya sapi juga diusahakan masuk untuk memacu timbulnya gas ditambah cuaca panas,” ungkap Zainal.

Dengan adanya biogas yang dimanfaatkannya selama ini, tentu memangkas biaya kebutuhan rumah tangganya. Tidak lagi perlu membeli gas LPG, karena kebutuhan untuk memasak sudah dipasok menggunakan biogas. “Ampasnya juga bisa dipakai sebagai pupuk untuk tanaman jagung,” tutup Zainal.

*Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari*

Sengketa Lahan Tambang di Loa Janan, Dihalangi Ormas, Aparat Polres Kukar Mundur

KUKAR - Akibat terhalang oleh Organisasi Masyarakat (Ormas), aparat Polres Kukar gagal menyelesaikan sengketa lahan antara dua perusahaan pertambangan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Padahal Ormas yang menghambat tindakan aparat tersebut mendukung perusahaan yang tidak memiliki legalitas kepemilikan tanah yang sah.

"Kami mempertimbangkan agar situasi tetap kondusif sambil memungkinkan kedua belah pihak untuk bertemu dan melakukan mediasi," ujar AKP Dharwis, yang didampingi oleh Kapolsek Loa Janan, AKP Andi, pada Jumat, 8 September 2023, sore di lokasi kejadian.

Sengketa antara PT Etam Manunggal Jaya dan perusahaan asing PT Indo Perkasa sudah berlangsung sekitar satu bulan, dan ini telah mengakibatkan penutupan jalur hauling yang dilakukan oleh Indo Perkasa. Pada Jumat (8/9) sore, pemerintah melalui aparat Kecamatan Loa Janan, Pemerintah Desa, Polsek, dan Polres mendatangi lokasi penutupan jalan tersebut.

Kehadiran pemerintah di lapangan bertujuan untuk memediasi dan memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak mengenai surat legalitas kepemilikan tanah mereka. "Kami ingin menjelaskan bahwa lahan ini benar-benar milik PT Etam Manunggal Jaya, yang telah memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang sah sejak tahun 2000 dan 2001," ujar Kasi Pemerintahan Kecamatan Loa Janan, Nazrul Halim.

Halim menjelaskan bahwa legalitas tanah yang dimiliki oleh PT Indo Perkasa, yang dibeli dari Hermansyah, telah dicabut oleh pihak kecamatan karena terdapat banyak ketidaksesuaian, seperti asal usul pembelian, letak, dan posisi batas tanah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Oleh karena itu, SKPT yang diterbitkan pada tahun 2018 dicabut," ujar Halim.

Oleh karena itu, jalur hauling yang



Pertemuan antara aparat pemerintah dengan PT Indo Perkasa dan PT Etam Manunggal Jaya pada Jumat, 8 September 2023.

telah ditutup oleh Indo Perkasa harus segera dibuka. Sebelumnya, Dharwis menjelaskan bahwa pembukaan jalur hauling ini merupakan solusi awal agar kedua perusahaan dapat melanjutkan aktivitas mereka sambil melakukan mediasi atau proses hukum yang sesuai.

Namun, pihak Indo Perkasa menolak penjelasan tersebut. Mereka diwakili oleh pimpinan organisasi masyarakat Laskar Borneo Nusantara, Samsul, yang meminta agar jalur hauling tersebut tetap tertutup. "Saya hanya menjalankan perintah ketua kami. Silakan mencari solusi yang baik-baik," ujar Samsul.

Menanggapi hal ini, pihak Polres Kukar akhirnya memutuskan untuk mundur. Saat berada di lokasi perselisihan, terlihat Ormas yang berjaga di sekitar PT Indo Perkasa yang telah menumpukkan tanah untuk menutup akses jalan milik Etam Manunggal Jaya. Sayangnya, ketika polisi mencoba membuka penutupan jalan tersebut, mereka dihentikan oleh Ormas. "Seharusnya aparat bisa tegas, karena kami juga ingin keadilan di mana kami adalah pemilik tanah yang sah," ujar Hermanto, Direktur Etam Manunggal Jaya.

Kepala Desa Loa Janan, Abdul Rasyid, juga mengambil sikap da-

lam masalah ini. "Saya tidak peduli dengan permasalahan kalian. Yang saya lihat di sini adalah masalah warga saya yang akan kehilangan mata pencaharian jika jalan ini ditutup. Jadi, tolong tinggalkan ego masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Rasyid menjelaskan bahwa ia siap membantu mediasi antara kedua belah pihak. Bahkan, jika dalam waktu 7 hari jalur jalan tidak dibuka, ia akan mengirim surat kepada kedua perusahaan untuk memberitahu bahwa jalur tersebut akan dibuka secara paksa. "Saya siap untuk mediasi. Saya juga siap untuk membuka jalan ini sendiri. Jika ada masalah hukum, silakan kalian selesaikan sendiri. Saya tidak akan memihak kepada salah satu dari kalian. Yang saya pikirkan adalah warga saya yang terdampak konflik ini," jelasnya.

Rasyid menyatakan niatnya untuk mengirim surat kepada kedua perusahaan tersebut, memberi tahu bahwa jalur tersebut akan segera dibuka kembali. **(Bom)**



ADY/RADAR KUKAR

Tendangan bola pertama yang dilakukan oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah sebagai penanda dimulainya Bupati Cup 2023.

20 Tim Siap Adu Skill di Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2023

TENGGARONG- Setelah tertunda selama 4 tahun lantaran pandemi COVID 19, akhirnya turnamen sepak bola Bupati Cup 2023, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali digelar.

Ditandai dengan penendangan bola pertama oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. Sebanyak 20 tim sepak bola putra yang mewakili masing-masing kecamatan saling beradu untuk keluar menjadi juara.

Dalam gelaran Bupati Cup tahun ini, tidak hanya mempertandingkan tim yang mewakili masing-masing kecamatan. Tapi juga ada pertandingan antar tim sepak bola wanita dan usia dini. Setidaknya ada 600 pemain, pelatih, dan official yang ikut terlibat dalam kompetisi ini.

Dalam kesempatan ini, Bupati Kukar, Edi Damansyah turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada panitia pelaksana, serta seluruh pihak yang terlibat dalam sukses terselenggaranya turnamen ini.

"Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen kuat dalam mendukung setiap upaya peningkatan prestasi olahraga di daerah ini," kata Edi dalam sambutannya saat membuka secara langsung turnamen sepak bola Bupati Cup 2023 di Stadion Rondong Demang, Jumat

(8/9/2023).

Ajang sepak bola ini, kata Edi, merupakan salah satu langkah positif yang harus didukung agar gairah olahraga di Kukar terus tumbuh dan berkembang.

"Saya tegaskan dalam setiap event olahraga, tidak ada lagi atlet dari luar. Kita harus memberdayakan atlet lokal Kukar, kita punya potensi atlet yang melimpah. Bahkan sudah ada yang berprestasi di taraf internasional," sambungnya.

Dia juga turut mendorong jajaran Dispora Kukar, KONI Kukar, ASKAB PSSI Kukar agar melakukan pembinaan intensif dan menggali talenta berbakat putra daerah.

Terakhir Edi juga berpesan, agar semua tim harus lebih bersemangat dalam kompetisi olahraga yang sportif, bersaing secara sehat, serta menampilkan performa terbaik.

"Mari kita jadikan ajang pertandingan ini sebagai momentum solidaritas untuk saling dukung dan bersatu kita jauhi potensi konflik dan kericuhan yang merugikan," tegasnya.

Sebagai informasi, turnamen sepak bola Bupati Cup merupakan agenda tahunan yang rutin terselenggara pada setiap tahunnya. Namun, ajang bergengsi ini sempat terhenti selama empat tahun lantaran pandemi

Covid-19, hingga akhirnya kembali terselenggara di tahun 2023.

Untuk menjamin keselamatan pra atlet yang bertanding, Dispora Kukar pun membekali semua unsur yang terlibat dalam turnamen ini dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar terhadap masa depan bibit olahraga Kukar di era Edi-Rendi.

"Semangat pembinaan tingkat desa meningkat ke kecamatan, kemudian digelar kompetisi di tingkat kabupaten. Ini tidak terlepas dari kegiatan pembinaan. Kalau pembinaan baik hasilnya baik," ucap Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2023, Zukran.

Seluruh pertandingan ini dilaksanakan di tiga lokasi. Yakni, Stadion Rondong Demang Tenggarong, Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, dan Lapangan Mini Soccer untuk usia dini.

"Kompetisi sepak bola ini resmi dimulai hari ini sampai 30 September 2023. Akhirnya akan dilaksanakan saat penutupan era untuk memperebutkan piala bergilir Bupati Kukar," tandasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha Ratnasari



SYAKURAH/RADAR BONTANG

Pelantikan anak cabang dan cabang ranting PPTI.

PPTI Resmi Dilantik, Siap Bantu Pemkot Tangani TBC

BONTANG - Anak cabang dan cabang Ranting Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) yang merupakan mitra Puskesmas resmi dilantik di Auditorium 3 Dimensi pada Jumat (8/9/2023). PPTI bertugas untuk membantu penanggulangan TBC di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Dalam penanggulangan TBC tentunya mengutamakan aspek promotif dan pencegahan tanpa mengabaikan aspek pengobatan dan grafitatif. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, serta kematian. Selain itu menurunkan dan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang timbul akibat tuberkulosis.

Bersama dengan PPTI ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) juga sekaligus berupaya penurunan kasus dengan mengunjungi Lapas, pesantren dan daerah-daerah yang sulit dijangkau. Misalnya, melakukan pengecekan

ke wilayah pesisir seperti Gusung, Malahing dan Tihi-tihi.

"Pelayanan Tuberkulosis termasuk dalam standar pelayanan minimal yang artinya cakupannya harus 100 persen" ujar Muhammad Ramsi selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Diketahui pada tahun 2022 lalu kasus TBC di Bontang mencapai 716 kasus, termasuk TBC anak. Kemudian pada tahun 2023 hingga bulan September ini sudah ada 504 kasus. Untuk terduga TBC sebanyak 4.806. Di sinilah peran PPTI Bontang menjangkau mereka dengan layanan yang sudah disediakan.

Indikasi terduga TBC adalah orang yang pernah kontak dengan mereka yang sudah terkena TBC, untuk melakukan konsultasi bisa dilakukan di Puskesmas serta rumah sakit dan ditanggung oleh BPJS.

"Kasus-kasus di Bontang ini adalah kasus yang masih dalam pengobatan, karena pengobatan kurang

lebih membutuhkan waktu selama 6 bulan," jelasnya.

Ketua PPTI Kota Bontang, Hapidah menjelaskan bahwa hal ini berguna untuk menaikkan derajat kesehatan di Bontang.

"Semoga teman-teman yang dilantik hari ini benar-benar bisa membantu pemerintah dalam penemuan kasus, agar cepat diobati," ungkapnya.

Penyuluhan hingga merujuk pasien terduga TBC dan memberikan pendampingan pasien yang diobati agar dapat menjalani pengobatan sampai sembuh. Selain itu juga berupaya memfasilitasi santunan bagi pasien TBC yang kurang mampu sesuai dengan kemampuan organisasi.

"Dari 504 kasus di Kota Bontang terdapat 5 kelurahan tertinggi, yaitu Loktuan, Gunung. Elai, Berbas Tengah, Bontang Kuala dan, Tanjung Laut," jelasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Nicha Ratnasari

APBD P 2023 Kutim Diproyeksikan Rp 9,788 Triliun

SANGATTA- Peraturan Daerah (Perda) APBD-P 2023 telah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman serta anggota DPRD Kutim setelah adanya kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-2.

Berita Acara Persetujuan Bersama ini akan disampaikan kepada Gubernur Kaltim dalam waktu 3 hari kerja untuk pengesahan. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menekankan bahwa APBD merupakan dasar penting dalam pembangunan dan pelayanan publik.

"APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemkab Kutim dalam melaksanakan fungsinya dengan cara mengatur pengeluaran, pendapatan dan pembiayaan daerah demi memenuhi tanggung jawab pemerintah di dalam

menyejahterakan rakyatnya," ujarnya di Ruang Sidang Utama Paripurna DPRD Kutim, Jumat (8/9/2023).

APBD Perubahan 2023 ini sudah melalui proses pembahasan yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai perspektif, pandangan melalui pembahasan yang mendalam.

"Pemkab Kutim menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kutim yang telah berperan aktif memberikan masukan, pendapat sejalan dengan fungsi legislatif yakni legislasi budgeting dan controlling terhadap postur APBD yang berorientasi kepada masyarakat," jelas Ardiansyah.

Adapun rincian APBD-P 2023 sebagai berikut Sektor Pendapatan Daerah sebesar Rp 8,256 triliun ter-

diri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 272, 536 miliar, Pendapatan Transfer Rp 7,444 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 539,564 miliar. Sedangkan Sektor Belanja sebesar Rp 9,788 triliun terdiri dari Belanja Operasional Rp 5,002 triliun, Belanja Modal Rp 3,941 triliun. Belanja tak terduga Rp 20 miliar dan Belanja Transfer Rp 824,943 miliar. Kemudian Sektor Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 1,579 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 46,500 miliar.

Pewarta : Irfan Aditama

Editor : Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BANYAK!

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

AUTO 2000
member of ASTRA

Drusan Toyota lebih mudah!
Bontang



DOKUMEN

Kebakaran hutan dan lahan di Paser.

Camat se Kabupaten Paser Diminta Patroli Karhutla

PASER - Para Camat se Kabupaten Paser diminta agar mengintensifkan kegiatan patroli di wilayahnya masing-masing sebagai upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu berdasarkan imbauan Bupati Paser, Fahmi Fadli melalui Surat Edaran nomor 364/1070/Tapem tentang Imbauan Penjagaan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Paser, tertanggal 25 Agustus 2023 lalu.

Adapun imbauan itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Karhutla.

"Bupati mengimbau kepada para camat agar melaksanakan kegia-

tan patroli pencegahan dan penyuluhan, sosialisasi serta kampanye melarang membuka lahan dengan cara membakar," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Paser, Lukman Dharma.

Dijelaskan Lukman, dalam surat ederan itu, para camat juga diminta untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) dan perangkat lainnya di wilayah masing-masing.

"Para camat juga diminta menginstruksikan kepada Lurah dan Kepala Desa, untuk menyampaikan ke masyarakat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla," tambahnya.

Lukman mengaku, saat ini sudah memasuki musim kemarau. Sehingga Bupati Paser, Fahmi Fadli, kata

Lukman, juga meminta para camat melakukan monitoring perkembangan curah hujan hingga pada tingkat kekeringan.

Hal tersebut bertujuan, guna waspada di puncak musim kemarau dan kondisi lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya bencana karhutla. Lukman menambahkan, dalam penanggulangan bencana karhutla, masyarakat hendaknya dilibatkan.

"Untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan bencana karhutla. Jika terjadi kebakaran, segera menghubungi dinas pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Paser," tutup Lukman.

*Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari*



41 Tahun Kideco: Bersama Membangun Masa Depan

PASER - Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. PT. Kideco Jaya Agung (Kideco) memperingati hari jadi ke 41, pada Kamis (7/8/2023), dengan mengusung tema "Bersama Membangun Masa Depan".

Pada peringatan kali ini, anak perusahaan PT Indika Energy Tbk itu, memberikan bantuan kepada pesantren dan panti asuhan di Kabupaten Paser. Pemberian bantuan itu sebagai wujud dari syukur serta kesadaran tumbuh dan besar bersama masyarakat di Kabupaten Paser.

Selain bantuan kepada pesantren dan panti asuhan, Kideco juga menyalurkan bantuan sembako dan menggelar pengobatan gratis terhadap warga prasejahtera dan lansia di 5 Desa lingkar tambang yakni Desa Muser, Bui, Samurangau, Legai dan Batu Butok di Kecamatan Muar Samu.

Terhadap para orangtua untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), Kideco juga mengadakan seminar serta pemberian bantuan berupa perlengkapan permainan edukasi dan tas sekolah di Yayasan Rahmatillah di Kecamatan Tanah Grogot.

Direktur Utama PT Kideco Jaya Agung, Mohammad Kurnia Ariawan

mengatakan, perusahaan tambang harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar area operasinya.

"Kami terus berupaya memastikan kinerja dan kelangsungan perusahaan berjalan dengan baik serta konsisten memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta menjamin kelestarian lingkungan," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa Kideco yang memiliki visi "the most reliable and eco-friendly Indonesian energy provider for sustainable future," selalu menerapkan konsep dan program Environmental, Social and Governance (ESG) dalam bisnis proses operasionalnya.

Selain itu Kideco juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur di wilayah sekitar lokasi tambang Kideco, di Kabupaten Paser, di bawah program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Komitmen itu menurut Kurnia, terbukti dari pencapaian dengan mendapatkan dua kali Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Emas nasional, pada

2019 dan 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Selain itu Kideco juga meraih peringkat Aditama untuk bidang lingkungan hidup pada ajang Good Mining Practice Award 2022 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta penghargaan Proper Emas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Kideco berkomitmen penuh mendukung program pencapaian net zero emission 2050 dan mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan gas emisi rumah kaca di tahun 2030," ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, pada momentum yang sama, Kideco mengadakan lomba cerdas cermat "Kideco Edu Champion" yang diikuti oleh 123 siswa siswa dari 41 sekolah tingkat SMP-SMA se Kabupaten Paser.

"Lomba cerdas cermat ini bertujuan untuk memotivasi siswa-siswi dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta membantu menemukan minat dan bakat mereka," pungkasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Kepala DPMD PPU, Pang Irawan

DPMD PPU Dorong Pembentukan Perbup Destana

PPU - Upaya penanganan bencana terus diupayakan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Khususnya pengendalian bencana hingga ke tingkatan desa seiring meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Benuo Taka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU tengah menyiapkan payung hukum berupa peraturan bupati (perbup) menyangkut Desa Tangguh Bencana (Destana). Regulasi ini menjadi dasar desa untuk membentuk relawan bencana dan penggunaan anggaran APBDes.

"Destana sebagai upaya mengurangi risiko dan menanggulangi bencana secara cepat dan tepat," kata Kepala DPMD PPU, Pang Irawan, Jumat (8/9/2023).

Selain itu, para relawan bencana bertugas melakukan sosialisasi kepada warga desa. Sekaligus memberikan pelatihan mengenai cara penanganan bencana.

Keberadaan Destana juga diharapkan bisa semakin menekan potensi terjadinya bencana. Terutama di wilayah yang rawan banjir, serta kebakaran dan tanah longsor, termasuk karhutla.

"Saat ini, sedang menyusun peraturan bupati atau peraturan kepala daerah menyangkut Destana di setiap desa," terangnya.

Usulan adanya regulasi ini pula, tertantum sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk pembentukan dan operasional.

"Dalam prioritas penggunaan dana desa dari APBD itu salah satunya untuk Destana," tambahnya.

Pun, DPMD PPU nantinya dapat memastikan Destana bakal masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Destana merupakan program setiap desa harus memiliki kemampuan mandiri

untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta dengan segera dapat mengetahui kerugian dampak bencana.

"Sejumlah desa di PPU telah menindaklanjuti pembentukan Destana dengan berisikan relawan tanggap bencana," sebut Pang Irawan.

Sekadar Informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim bersama BPBD PPU pada Juni lalu melaksanakan sosialisasi pembentukan. Hal ini sebagai upaya Pemprov Kaltim dalam pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM).

Sesuai data, saat ini di PPU telah ada 12 kelurahan/desa yang telah membentuk Destana. Meliputi Desa Bukit Subur, Desa Rintik, Desa Sumber Sari, Desa Bangun Mulya, Desa Sebakung Jaya, Desa Karang Jinawi, Desa Babulu Laut, Desa Api-Api, Desa Sesulu, Kelurahan Riko, Kelurahan Sepaku, dan Kelurahan Salo-loang. (SBK)



PUSDALOPS BPBD PPU FOR MEDIAKALTIMGROUP

Pemadaman karhutla di Kelurahan Gunung Seteleng, Jumat (8/9/2023).

Semakin Meluas, Karhutla di PPU Sudah Hanguskan 90 Hektare Lahan

PPU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Penajam Paser Utara (PPU) terus meluas dan berpotensi terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan.

Hingga saat ini, luas lahan dan hutan yang terbakar telah mencapai 90 hektare yang tercatat sejak Juli 2023. Lokasi karhutla terluas terjadi di Kecamatan Penajam, menyusul di Kecamatan Waru dan Babulu.

"Berdasarkan data Kami, sudah ada lebih kurang 90 hektare karhutla terjadi sejak Juli, termasuk luas lahan yang hari ini kami tangani," ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Budi Santoso, Jumat (8/9/2023).

Untuk kejadian hari ini, ada 5 kasus karhutla. Yakni di RT 06, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Pe-

najam. Terjadi pada sekitar pukul 10.50 Wita.

Kejadian kedua pada pukul 11.52 Wita Karhutla terjadi di RT 08, Kelurahan Sungai Parit. Kemudian Karhutla ketiga pada pukul 16.00 Wita terjadi di Desa Sri Raharja Kecamatan Babulu.

Lagi di 16.30 Wita di Jalan Bunga Bayam, Kelurahan Gunung Seteleng. Lalu, laporan karhutla yang keempat pada pukul 18.01 Wita dengan lokasi lahan yang terbakar di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam.

"Hingga kini terdapat 38 kali kejadian laporan yang kami terima. Semua personel bersama tim gabungan dari TNI, Polri, unsur pemerintah daerah lainnya dan dibantu oleh masyarakat tetap semangat," jelas Budi.

Ia memprediksi, luasan lahan dan hutan yang terbakar kemungkinan bertambah selama musim kemarau ini. Kebakaran lahan bisa terjadi di mana saja di Kabupaten PPU, karena semua lahan itu rawan terbakar.

Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dampak musim El Nino saat ini waktunya masih panjang. Artinya musim kemarau masih lama, dan diperkirakan dapat terjadi hingga awal November.

"Sehingga Saya meminta agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan karena material yang ada di lahan warga itu sudah sangat kering sehingga sangat mudah terbakar," pungkasnya. (SBK)



DPRD Kaltim Setor 5 Nama Usulan Bakal Calon Pj Gubernur ke Kemendagri

SAMARINDA - DPRD Kaltim telah memutuskan untuk membawa lima nama bakal calon Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri). Hal ini terkait untuk mengisi kekosongan jabatan pasca berakhirnya masa jabatan Isran Noor pada Oktober mendatang.

Meski yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa DPRD dapat dapat mengusulkan tiga nama untuk menjadi Pj Gubernur. Akan tetapi yang dilakukan DPRD Kaltim justru membawa semua nama- nama usulan semua fraksi di Karang Paci.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menerangkan, hal ini dilakukan untuk mengakomodir setiap usulan fraksi. Lagipula menurutnya, tak sedikit Pj Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri yang merupakan "Orang Pusat".

"Kita kirim tiga pun belum tentu disetujui, makanya kita kirim semua. Jadi tidak ada aspirasi yang tidak diakomodir. Semua sesuai, dan ada penjelasannya. Adapun pembobotan dan matriksnya ada keterangan di situ," jelasnya kepada awal media, Jumat (8/9/2023).

Politisi Golkar ini merasa pesimis usulan dari DPRD Kaltim dapat diterima dan dipilih oleh Presiden melalui Kemendagri. Palsanya, melihat sejumlah Pj yang dilantik, merupakan tokoh-tokoh yang memang di level pemerintahan pusat.

"Tetap saja dari kemarin-kemarin semua dari pusat. Kalau pun ada yang terpilih dari sekda itu sudah dititip di situ," tegasnya.

"Saya lihat agak banci sih aturan itu, karena kita enggak ada orang sebagai asesor, tetap kembali ke pusat, mendagri tapi dari presiden," sambungnya.

Meski demikian Hasan tak membeberkan nama-nama

berdasar ranking pembobotan.

Yang jelas lima nama yang menjadi usulan DPRD Kaltim yakni, Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur, Deputi Bidang Sosial dan Budaya Badan Otorita IKN, Alimudin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag H Kamaruddin Amin, dan Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik serta Sri Wahyuni Sekdraprov Kaltim.

"Kita mengirimkan ke lima nama itu dengan ranking dan abjad nama, nanti mereka yang lihat," tutupnya.

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigun Karama No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang

APBD TERBATAS, INFRASTRUKTUR BERTAHAP

BACA HALAMAN 2



KAPOLDA KALTIM BERI PERHATIAN UNTUK ANAK STUNTING

BACA HALAMAN 5



MARTINUS/MKR

Perbaikan sejumlah ruas jalan di wilayah Bulungan dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran.

APBD Terbatas, Infrastruktur Bertahap



MARTINUS/MKR

Bupati Bulungan, Syarwani

TANJUNG SELOR - Beberapa ruas jalan dengan kondisi rusak menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Hal itu melalui skema penganggaran APBD tahun 2024 mendatang.

Bupati Bulungan, Syarwani memaparkan, penanganan perbaikan jalan rusak yang akan menjadi prioritas, yakni jalan poros dari Tanjung Selor hingga Kecamatan Tanjung Palas Timur.

"Semuanya tidak mungkin dapat diakomodir, sehingga pengerjaannya dilakukan bertahap. Seperti jalan poros Tanjung Selor sampai Tanjung Palas Timur itu perbaikan hanya dilakukan pada titik yang tergolong rusak parah," ungkapnya, Jumat (8/9/2023).

Dia menuturkan, selain jalan poros Tanjung Selor - Tanjung Palas Timur, Pemkab Bulungan juga berfokus pada perbaikan ruas jalan Desa Salimbatu menuju Desa Kelubir. "Jalan dari Desa Kelubir menuju Desa Karang Agung juga

kami prioritaskan, karena jalan itu akses terdekat ke Tanjung Selor," ujarnya.

Tak hanya itu, Syarwani juga menyebutkan beberapa ruas jalan di Hulu Sungai Kayan akan menjadi prioritas pada penganggaran tahun depan.

"Belum lama ini saya melakukan kunjungan ke Desa Long Buang dan Long Yin. Kendala utama yang dihadapi masyarakat disana Jembatan Nyelung yang kerap terendam banjir," bebernya.

Soal penanganan beberapa spot jalan rusak tersebut, Syarwani mengaku akan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan pemerintah pusat. Mengingat, kebutuhan anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan ini cukup besar. "Karena kalau mau anggarakan lewat APBD, tidak memungkinkan. Mengingat, nilai APBD kita tergolong kecil," pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

PLT Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius Menjelaskan enam aspek fokus pembangunan pemerintah khusus pada penganggaran.

Bappeda Litbang Kaltara: Ada Enam Aspek Fokus Pembangunan pada 2024 Mendatang

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tengah menyusun rencana pembangunan dan penganggaran untuk tahun 2024 mendatang. Diketahui, ada enam aspek yang difokuskan.

Plt Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius menyebut seluruh penganggaran yang dilakukan tidak terlepas dari mandatory spending atau pengeluaran negara yang sudah diatur dalam undang-undang.

"Saat ini Pemprov Kaltara tengah menyusun rencana pembangunan dan penganggaran untuk tahun 2024 nanti," ungkapnya, Jumat (8/9/2023).

Dia memaparkan, dari enam aspek yang menjadi titik fokus Pemprov Kaltara, salah satunya adalah kegiatan yang bersifat mandatory spending. "Salah satunya pada bidang kesehatan," ujarnya.

Bertius menerangkan, selain pada aspek kesehatan, Pemprov Kaltara juga fokus kepada pendidikan dan pengendalian inflasi.

"Karena inflasi menjadi indikator melihat perkembangan ekonomi daerah, apakah dalam kondisi bagus atau tidak," terangnya.

Disamping itu, Pemprov Kaltara, kata dia intens menjalankan sejumlah kegiatan yang sejalan dengan rencana pembangunan prioritas pemerintah pusat. Termasuk kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri.

Selain itu, memasuki tahun politik pemilu 2024 ikut mempengaruhi postur belanja daerah. Hal ini mesti diarahkan, demi menjaga stabilitas politik di daerah.

Termasuk, penganggaran untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kaltara. Targetnya, angka kemiskinan bisa zero atau nol persen pada tahun 2024. Karena se-

lain kemiskinan, ada lagi yang disebut dengan kemiskinan ekstrem.

"Kalau tidak salah, angka kemiskinan ekstrem di Kaltara masih di angka 0,63 persen. Kita terus berupaya kalau bisa ditahun 2024 angkanya bisa 0 persen," imbuhnya.

Kemiskinan ekstrem ini menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Termasuk instruksi menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Kaltara.

Kendati demikian, Bertius menegaskan, pemerintah berkomitmen menurunkan angka stunting dengan mengalokasikan anggaran ke setiap Kabupaten dan Kota di Kaltara.

"Kita terus jalin kolaborasi pembangunan antara eksekutif dan legislatif. Dengan tujuan memajukan dan memudahkan membangun daerah," pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman

Pembangunan RSJ Kaltara Telan Rp 200 Miliar

TANJUNG SELOR - Rencana pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) tengah berproses. Lokasi pembangunan juga sudah ditetapkan, yakni di Pesawan, Desa Sepunggur Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan dengan luas lahan sekisar 9 hektare.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman menyebut, pemilihan Bulungan menjadi lokasi pembangunan RSJ bukan tanpa sebab. Pasalnya, kabupaten dengan sebutan Kota Ibadah itu merupakan pusat sentral Ibu Kota Kaltara. "Anggaran yang kita usulkan sekitar Rp 200 miliar," ucap Usman, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/9/2023).

Dia menerangkan, pembangunan RSJ saat ini telah memasuki tahap mempersiapkan lahan. Sedangkan, konsep pembangunan juga tengah dipersiapkan Pemprov Kaltara.

Perlu diketahui, di Kaltara memang belum memiliki RSJ. Usulan tersebut juga telah disampaikan sejak lama.

Namun, teknisnya disiapkan lahan terlebih dahulu, selanjutnya diusulkan dalam pembangunan skala prioritas.

"Kita sudah lakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PMK). Memang secara aturan, RSJ itu mesti ada minimal satu di tiap Provinsi. Apalagi, tren kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kaltara alami peningkatan yang cukup tinggi," bebernya.

Dibeberkan Usman, angka kasus ODGJ mencapai ratusan yang tersebar paling banyak di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Saat ini, penanganan ODGJ di Kaltara telah disiapkan bangsal khusus seperti di Rumah Sakit Tarakan.

"Kita telah disediakan bangsal khusus terhadap mereka yang alami gangguan jiwa. Pantauan terkini, kapasitasnya sudah melebihi sehingga keberadaan RSJ di Kaltara sangat

diperlukan," terangnya.

ODGJ di Kaltara, selama ini dilakukan rehabilitasi di Tarakan. "Kondisi bangsalnya telah penuh atau over kapasitas. Sehingga pembangunan RSJ sangat di butuhkan untuk di Kaltara," imbuhnya.

Sementara ini, dinkes Kaltara terus berupaya dengan intens berkoordinasi, sehingga bisa mendapatkan dukungan dari pusat. Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan, Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Bulungan, Rustam saat dikonfirmasi berharap usulan itu dapat segera terealisasi.

"Karena selama ini kalau ada kasus ODGJ gawat, kita selalu rujuk ke Tarakan atau Samarinda, makanya dari pusat itu mewajibkan bahwa setiap provinsi harus punya RSJ," pungkasnya. **(tin/and)**

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



HUMAS POLRES BERAU

Kapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto saat melakukan kunjungan kerja ke Polsek Gunung Tabur.

Kunjungan ke Berau, Kapolda Kaltim Beri Perhatian untuk Anak Stunting

TANJUNG REDEB - Dalam rangka program patroli jarak jauh, Kapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto melakukan kunjungan kerja kedua ke Polres Berau, khususnya Polsek Gunung Tabur. Diketahui, program tersebut sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam kunjungannya ke Bumi Batiwakkal, Kapolda Kaltim didampingi oleh Ketua Bhayangkari Kaltim, Ade Imam Sugianto serta Kapolres Berau, AKBP Steyven Jonly Manopo.

Disela kunjungannya, Irjen Pol Imam Sugianto membawa misi sosial, yakni memberikan perhatian kepada anak-anak penderita stunting atau kondisi yang menghambat perkembangan fisik.

"Bantuan kesehatan yang diber-

ikan berupa nutrisi, dengan harapan anak-anak dapat tumbuh sehat dan memiliki kesempatan bersaing dengan anak-anak seumurannya," ungkap Irjen Pol Imam Sugianto.

Dia menegaskan, polisi berperan penting menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Maka dari itu, program patroli jarak jauh menjadi salah satu upaya untuk tetap terhubung dengan masyarakat, meski dalam situasi yang berbeda.

"Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat, termasuk anak-anak yang mengalami stunting. Melalui patroli jarak jauh ini, kami dapat menjaga keamanan sambil tetap memberikan perhatian kepada yang membutuhkan," ujar orang nomor satu di Polda Kaltim itu.

Selain memberikan bantuan kese-

hatan dan nutrisi kepada anak-anak stunting, Kapolda Kaltim juga berbin-cang dengan masyarakat setempat untuk mendengar berbagai masukan dan keluhan yang mereka miliki. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya polisi untuk memahami kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada mereka.

"Kami berharap, usai dari kegiatan ini, jajaran yang ada di Polda Kaltim bisa terus menjalankan program patroli jarak jauh ini dengan baik, menjaga keamanan wilayahnya, dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Polri dalam melayani dan melindungi masyarakat," tandas mantan Asops Polri itu. (and)